



Pengaruh Efisiensi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Anggaran dengan Transparansi Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kota Jambi

Vema Rosalia^{1*}, Afrizal¹, Nela Safelia¹

¹Master of Accounting Science, Faculty of Economics and Business, University of Jambi, Indonesia

*Corresponding author email: vemmarosalia@gmail.com¹

Article Info

Article history:

Received April 10, 2026

Approved May 11, 2026

Keywords:

Efficiency, Accountability, Budget Effectiveness, Transparency, Jambi City Government.

ABSTRACT

This study aims to analyse the influence of efficiency and accountability on budget effectiveness with transparency as a mediating variable in the Jambi City Government. Efficiency and accountability are key factors in budget management that can increase its effectiveness in this study. Transparency, as a supporting instrument, is believed to strengthen the relationship between efficiency, accountability, and budget effectiveness. This study examines all Regional Apparatus Organisations (OPD) in the Jambi City Government, which includes 27 OPDs involved in budget management, planning, reporting, and oversight. The method used is a quantitative approach with purposive sampling of employees directly involved in the process. Data was collected through questionnaires and analysed using Structural Equation Modelling (SEM) to test the direct and mediating relationships between the variables under study. It is hoped that the results of this study can contribute to improving efficiency, accountability, and transparency in regional budget management, as well as serving as a reference for the development of better regional financial management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi dan akuntabilitas terhadap efektivitas anggaran dengan transparansi sebagai variabel mediasi di Pemerintah Kota Jambi. Efisiensi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam pengelolaan anggaran yang dapat meningkatkan efektivitasnya dalam penelitian ini. Transparansi, sebagai instrumen pendukung, diyakini dapat memperkuat hubungan antara efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran. Penelitian ini mengkaji seluruh Organisasi Aparatur Daerah (PPH) di Pemerintah Kota Jambi, yang meliputi 27 PHK yang terlibat dalam pengelolaan, perencanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengambilan sampel purposif dari pegawai yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) untuk menguji hubungan langsung dan mediasi antar variabel yang diteliti. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta menjadi acuan untuk pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Rosalia, V., Afrizal, A., & Safelia, N. (2026). Pengaruh Efisiensi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Anggaran dengan Transparansi Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(2), 1540–1553. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i2.5883>

PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian menuntut pemerintah mampu mengelola fiskal secara lebih hati-hati. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi penting karena berfungsi menjaga stabilitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kuncoro, 2020). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Dalam konteks ini, APBD berperan sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan kebijakan fiskal yang menentukan arah pengelolaan pembangunan daerah (Halim, 2018). Pengelolaan anggaran yang berkualitas menuntut penggunaan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata, yang menjadi dasar penerapan konsep *Value for Money* (Mardiasmo, 2018).

Konsep *Value for Money* mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi menekankan penggunaan input secara hemat tanpa menurunkan kualitas, efisiensi menilai perbandingan input dan output, sedangkan efektivitas mengukur keberhasilan pencapaian outcome program (Mahmudi, 2019). Penerapan Value for Money erat kaitannya dengan prinsip *Good Governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi sebagai elemen kunci tata kelola yang baik (Sedarmayanti, 2017). Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya, sementara transparansi membuka akses publik terhadap informasi keuangan untuk mendukung pengawasan (Putra & Yunita, 2021), yang diperkuat melalui PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan APBD.

Namun, implementasi Good Governance masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya anggaran berbasis kinerja, pemborosan, duplikasi program, dan alokasi yang tidak tepat sasaran (Simanjuntak, 2020). Temuan BPK (2023) menunjukkan banyak kegiatan pemerintah belum memberikan manfaat nyata meskipun anggaran terserap, serta masih adanya celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini tercermin dari dominasi belanja rutin dan rendahnya kemandirian fiskal daerah, yang menunjukkan lemahnya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam mendorong Value for Money secara substantif (Sari & Widodo, 2022).

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai kemampuan anggaran menghasilkan output dan outcome sesuai tujuan pembangunan (Mahmudi, 2015). Efektivitas tidak hanya dinilai dari output, tetapi juga dari efisiensi penggunaan sumber daya serta akuntabilitas dan transparansi pelaporan (Bili & Siswati, 2025; Surya, 2025). Penelitian Fitri dan Khotimah (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi, termasuk melalui platform LPSE, berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini mengkaji pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Jambi periode 2020–2024 dengan membandingkan anggaran dan realisasi. Hasilnya menunjukkan fluktuasi rasio efisiensi setiap tahun meskipun transparansi data melalui LPSE relatif konsisten. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran mengindikasikan adanya ketidakstabilan efisiensi yang berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Secara umum, efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah menggunakan dana secara tepat sasaran dan minim pemborosan untuk mencapai output optimal. Efisiensi terbukti berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Sari, 2025; Oktaviany, Desyana, & Kurniawan, 2024), terutama jika didukung sistem pengawasan dan transparansi yang memadai (Maimunah & Elgina, 2023). Selain itu, akuntabilitas juga berperan

penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas anggaran melalui penguatan disiplin, transparansi, dan kepercayaan publik (Tarima, 2022; Fitri & Sofiyani, 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran apabila tidak didukung oleh transparansi dan partisipasi publik. Putra & Widodo (2025) serta Sari & Pebriyani (2025) menemukan bahwa lemahnya transparansi menyebabkan akuntabilitas tidak mampu meningkatkan efektivitas secara optimal, sehingga transparansi—khususnya transparansi digital—perlu diposisikan sebagai variabel mediasi. Sebaliknya, Hasanah (2021) membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang didukung laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran. Namun, efektivitas juga dapat dipengaruhi faktor eksternal seperti perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi makro, yang membuat pengaruhnya terhadap kinerja tertentu menjadi tidak signifikan jika transparansi tidak berfungsi optimal (Putri & Sitabuana, 2022).

Transparansi semakin dipandang penting sebagai mediator yang menghubungkan efisiensi dan akuntabilitas dengan efektivitas anggaran. Malik (2020) menunjukkan bahwa transparansi digital meningkatkan pengawasan publik dan menekan potensi korupsi, sementara Maimunah & Elgina (2023) menegaskan bahwa peran transparansi sangat bergantung pada kesiapan teknologi, institusi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Kota Jambi, fluktuasi rasio efisiensi dan variasi kualitas pelaporan digital antar tahun menunjukkan dinamika yang berbeda dari temuan umum literatur, sehingga memerlukan kajian empiris yang lebih kontekstual.

Kajian internasional turut mendukung peran strategis transparansi. Chen & Neshkova (2020) serta Chen & Hu (2025) menemukan bahwa transparansi fiskal dan audit nasional meningkatkan kualitas tata kelola dan menurunkan persepsi korupsi, sementara López-López et al. (2018) menunjukkan bahwa e-government memperkuat transparansi dan efektivitas layanan publik. Temuan tersebut menegaskan bahwa efisiensi dan akuntabilitas tidak hanya berpengaruh langsung terhadap efektivitas anggaran, tetapi juga secara tidak langsung melalui transparansi, termasuk transparansi LPSE sebagai instrumen pengadaan yang akuntabel.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh efisiensi dan akuntabilitas terhadap efektivitas anggaran dengan transparansi sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Kota Jambi. Secara akademis, penelitian ini mengisi celah kajian jalur pengaruh tidak langsung ($X \rightarrow M \rightarrow Y$) yang masih terbatas. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi penguatan akuntabilitas dan transparansi online guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari penggunaan LPSE, tetapi juga dari keterbukaan informasi pengelolaan anggaran di tingkat OPD, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh Efisiensi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Anggaran Dengan Transparansi Sebagai Variabel Mediasi Pada Pemerintah Kota Jambi”.

METODE

Objek penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, termasuk Dinas Kesehatan, BPKAD, dan OPD terkait lainnya, dengan fokus pada peran OPD dalam mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi guna

meningkatkan efektivitas anggaran. Subjek penelitian meliputi pegawai Pemerintah Kota Jambi yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran, seperti bendahara OPD, staf keuangan, akuntansi, dan perencanaan anggaran di 27 OPD. Pemilihan responden dilakukan melalui teknik purposive sampling, berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh pegawai pengelola anggaran pada 27 OPD di Pemerintah Kota Jambi. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria pegawai yang berperan dalam perencanaan, akuntansi, dan pelaporan anggaran. Setiap OPD diwakili oleh tiga responden, sehingga total sampel berjumlah 81 responden. Jumlah ini dinilai mampu merepresentasikan karakteristik populasi dan memberikan gambaran yang akurat mengenai pengelolaan anggaran daerah.

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif, bertujuan menguji hubungan kausal antara efisiensi dan akuntabilitas terhadap efektivitas anggaran, dengan transparansi sebagai variabel mediasi (Surya, 2025; Putra & Wijaya, 2025). Desain penelitian yang digunakan adalah asosiatif eksplanatori, yang memungkinkan pengujian hipotesis berbasis data numerik melalui analisis statistik (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dalam konteks pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Jambi.

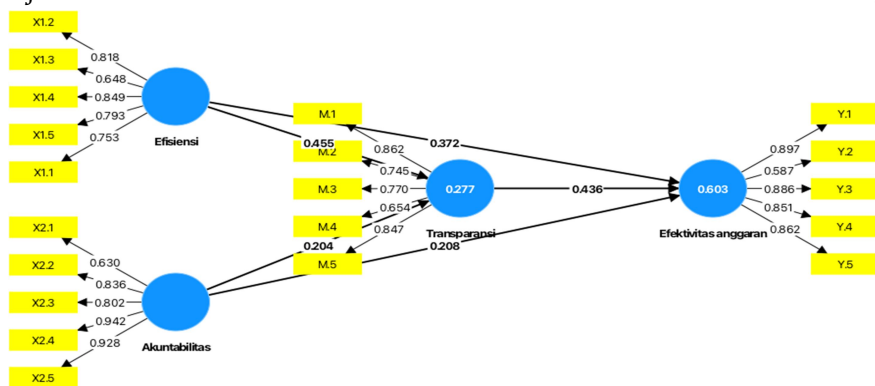
Data penelitian terdiri dari data primer, yang dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi. Kuesioner digunakan untuk mengukur efisiensi, akuntabilitas, efektivitas anggaran, dan transparansi (Sugiyono, 2020; Marlina Widiyanti, 2022). Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS, yang memungkinkan pengujian hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel penelitian. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mengkaji pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif (Putra & Wijaya, 2025; Setiawan & Nugroho, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Model Pengukuran (Outer Model)

Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Validitas konvergen dinilai melalui nilai loading factor yang menunjukkan korelasi antara indikator dan konstruk. Indikator dinyatakan valid apabila memiliki loading factor $\geq 0,7$. Meskipun Hair et al. (1998) menyebutkan bahwa nilai $\geq 0,3$ masih dapat diterima pada tahap awal, penelitian ini menggunakan batas $\geq 0,7$. Hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS 4.0.9 menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen.



Gambar 1. Nilai loading faktor seluruh item penelitian

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

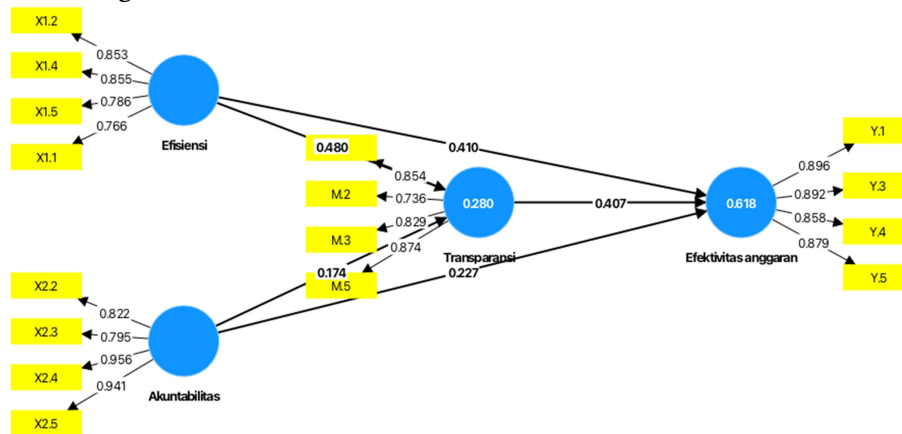
Gambar di atas menunjukkan ringkasan yang kemudian dirangkum pada Tabel berikut. Berdasarkan rangkuman tersebut, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Loading Faktor

	Transparansi	Efisiensi	Akuntabilitas	Efektivitas anggaran	Ket
M.1	0,862				Valid
M.2	0,745				Valid
M.3	0,770				Valid
M.4	0,654				Tidak Valid
M.5	0,847				Valid
X1.1		0,753			Valid
X1.2		0,818			Valid
X1.3		0,648			Tidak Valid
X1.4		0,849			Valid
X1.5		0,793			Valid
X2.1			0,630		Tidak Valid
X2.2			0,836		Valid
X2.3			0,802		Valid
X2.4			0,942		Valid
X2.5			0,928		Valid
Y.1				0,897	Valid
Y.2				0,587	Tidak Valid
Y.3				0,886	Valid
Y.4				0,851	Valid
Y.5				0,862	Valid

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki nilai loading $\geq 0,70$ dan dinyatakan valid. Indikator yang tidak memenuhi kriteria dan perlu dieliminasi adalah M4 (0,654), X1.3 (0,648), X2.1 (0,630), dan Y2 (0,587) agar kualitas model pengukuran meningkat.



Gambar 2. Nilai loading faktor seluruh item penelitian iterasi 2

Gambar 2 menampilkan nilai loading faktor pada iterasi 2 untuk konstruk Efisiensi, Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Anggaran. Hasilnya menunjukkan bahwa Efisiensi dan Akuntabilitas memiliki loading faktor relatif tinggi, Transparansi lebih rendah, sementara Efektivitas Anggaran menunjukkan kontribusi indikator yang sangat kuat.

Tabel 2. Nilai Loading Faktor

	Transparansi	Efisiensi	Akuntabilitas	Efektivitas anggaran	Ket
M.1	0,854				Valid
M.2	0,736				Valid
M.3	0,829				Valid
M.5	0,874				Valid
X1.1		0,766			Valid
X1.2		0,853			Valid
X1.4		0,855			Valid
X1.5		0,786			Valid
X2.2			0,822		Valid
X2.3			0,795		Valid
X2.4			0,956		Valid
X2.5			0,941		Valid
Y.1				0,896	Valid
Y.3				0,892	Valid
Y.4				0,858	Valid
Y.5				0,879	Valid

Berdasarkan Tabel 2, seluruh indikator pada konstruk Transparansi, Efisiensi, Akuntabilitas, dan Efektivitas Anggaran memiliki nilai loading faktor > 0,70, sehingga memenuhi validitas konvergen dan model pengukuran dinyatakan layak.

Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan diuji melalui cross loading, dengan kriteria nilai korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan konstruk lain (Kock, 2014; 2015; 2020b). Hasil analisis SmartPLS menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi.

Tabel 4. Hasil *Cross Loading*

	Transparansi	Efisiensi	Akuntabilitas	Efektivitas anggaran
M.1	0,854	0,415	0,331	0,733
M.2	0,736	0,212	0,105	0,417
M.3	0,829	0,400	0,028	0,368
M.5	0,874	0,554	0,196	0,561
X1.1	0,299	0,766	0,054	0,350
X1.2	0,555	0,853	0,107	0,610
X1.4	0,430	0,855	0,129	0,653
X1.5	0,220	0,786	0,059	0,327
X2.2	0,216	0,142	0,822	0,237
X2.3	0,082	-0,071	0,795	0,057
X2.4	0,251	0,136	0,956	0,452
X2.5	0,174	0,077	0,941	0,323
Y.1	0,623	0,474	0,392	0,896
Y.3	0,568	0,486	0,406	0,892
Y.4	0,600	0,634	0,203	0,858
Y.5	0,553	0,656	0,305	0,879

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Hasil cross loading pada Tabel 4 menunjukkan bahwa korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lain. Dengan demikian, seluruh

konstruk telah memenuhi discriminant validity yang baik dan menunjukkan reliabilitas yang memadai.

Fornel-Larcker Criterion

Tabel 5. *Fornel-Larcker Criterion*

	Akuntabilitas	Efektivitas anggaran	Efisiensi	Transparansi
Akuntabilitas	0,826			
Efektivitas anggaran	0,355	0,877		
Efisiensi	0,139	0,647	0,812	
Transparansi	0,265	0,733	0,507	0,833

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan uji Fornell-Larcker Criterion pada Tabel 5, nilai square root AVE setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi discriminant validity dan dinyatakan valid.

Composite Reliability dan AVE

Selanjutnya, evaluasi Composite Reliability (CR) dan Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai CR > 0,70 dan AVE > 0,50. Dengan demikian, konstruk dinyatakan reliabel dan memiliki validitas konvergen yang baik, sehingga model pengukuran layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 6. Nilai *Composite Reliability* dan AVE

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas	0,912	1,018	0,932	0,776
Efektivitas anggaran	0,904	0,904	0,933	0,777
Efisiensi	0,840	0,893	0,888	0,666
Transparansi	0,844	0,894	0,895	0,680

Berdasarkan tabel, mayoritas konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas, ditunjukkan oleh nilai AVE > 0,5 serta Composite Reliability, Cronbach's Alpha, dan rho_A > 0,7. Dengan demikian, seluruh variabel dinyatakan reliabel dan data layak digunakan untuk analisis lanjutan.

HTMT

Selanjutnya, HTMT digunakan untuk menguji validitas diskriminan antar konstruk. Menurut Henseler et al. (2015), validitas diskriminan terpenuhi apabila nilai HTMT < 0,85 atau 0,90. Nilai HTMT yang berada di bawah ambang batas menunjukkan bahwa antar konstruk telah terbedakan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih pengukuran.

Tabel 7. Nilai HTMT

	Akuntabilitas	Efektivitas anggaran	Efisiensi	Transparansi
Akuntabilitas				
Efektivitas anggaran	0,336			
Efisiensi	0,127	0,674		
Transparansi	0,206	0,720	0,520	

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Hasil pengujian HTMT (Tabel 11) menunjukkan semua nilai antar konstruk berada di bawah ambang batas 0,85–0,90. Nilai tertinggi 0,720 (Efektivitas Anggaran–Transparansi) menunjukkan keterkaitan kuat namun tetap berbeda, sedangkan nilai terendah 0,127

(Akuntabilitas–Efisiensi) menegaskan perbedaan jelas antar konstruk. Dengan demikian, validitas diskriminan terpenuhi dan model siap diuji pada inner model.

Pengujian Inner Model

Nilai R² model

Pengujian Inner Model (R²): Nilai R² mengukur proporsi variansi konstruk endogen yang dapat dijelaskan model. R² berkisar 0–1, dengan panduan umum: 0,75 (tinggi), 0,50 (moderate), 0,25 (rendah) (Hair et al., 2011). Nilai R² yang lebih tinggi menunjukkan prediksi yang lebih akurat, sehingga digunakan untuk menilai kualitas model struktural sebelum analisis koefisien jalur (path coefficient).

Tabel 8. Nilai R-Square model

	R-square	R-square adjusted
Efektivitas anggaran	0,618	0,603
Transparansi	0,280	0,262

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan Tabel 7, R² Efektivitas Anggaran sebesar 0,618 (adjusted 0,603) menunjukkan 61,8% variasi dapat dijelaskan oleh Efisiensi, Akuntabilitas, dan Transparansi, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Transparansi memiliki R² 0,280 (adjusted 0,262), artinya 28% variasinya dijelaskan oleh Efisiensi dan Akuntabilitas. Secara keseluruhan, model menunjukkan daya jelaskan sedang hingga kuat dan layak untuk pengujian hipotesis.

Nilai F² model

Mengukur besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variansi konstruk endogen. Panduan Cohen (1988): <0,02 = efek kecil, 0,02–0,15 = efek sedang, >0,15 = efek besar. Nilai f² digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel terhadap konstruk endogen dalam model.

Tabel 9. Nilai F-Square model

	f-square
Akuntabilitas -> Efektivitas anggaran	0,128
Akuntabilitas -> Transparansi	0,041
Efisiensi -> Efektivitas anggaran	0,330
Efisiensi -> Transparansi	0,316
Transparansi -> Efektivitas anggaran	0,312

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Berdasarkan Tabel 9, Efisiensi memiliki efek besar terhadap Efektivitas Anggaran (f² = 0,330) dan Transparansi (f² = 0,316), sedangkan Transparansi juga memiliki efek besar terhadap Efektivitas Anggaran (f² = 0,312). Akuntabilitas hanya menunjukkan efek kecil hingga sedang terhadap Efektivitas Anggaran (f² = 0,128) dan efek kecil terhadap Transparansi (f² = 0,041). Hal ini menunjukkan bahwa Efisiensi dan Transparansi merupakan konstruk dominan dalam menjelaskan variasi Efektivitas Anggaran.

Nilai VIF

Variance Inflation Factor (VIF) digunakan untuk mendeteksi kolinearitas antar variabel. Model dianggap fit jika VIF < 5, menandakan tidak ada hubungan linier yang terlalu kuat yang dapat mempengaruhi stabilitas estimasi koefisien.

Tabel 10. Nilai VIF model

	VIF
Akuntabilitas -> Efektivitas anggaran	1,056
Akuntabilitas -> Transparansi	1,014
Efisiensi -> Efektivitas anggaran	1,334
Efisiensi -> Transparansi	1,014
Transparansi -> Efektivitas anggaran	1,389

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Semua nilai VIF antar variabel penelitian berada di bawah 5 (1,014–1,389), menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas. Dengan demikian, model memenuhi kriteria inner model dan layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Predictive Relevance (Q²)

Q² digunakan untuk menilai relevansi prediktif model PLS-SEM, yaitu seberapa besar pengaruh konstruk eksogen terhadap prediksi konstruk endogen. Nilai Q² > 0,02, 0,15, dan 0,35 menunjukkan relevansi kecil, sedang, dan besar. Q² membantu mengukur seberapa baik model memprediksi hasil penelitian.

Tabel 11. Predictive Relevance

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Akuntabilitas	324,000	324,000	0,000
Efektivitas anggaran	324,000	175,584	0,458
Efisiensi	324,000	324,000	0,000
Transparansi	324,000	271,949	0,161

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Nilai Q² positif pada konstruk Efektivitas Anggaran (0,458) dan Transparansi (0,161) menunjukkan model memiliki relevansi prediktif yang baik, terutama kuat pada Efektivitas Anggaran. Akuntabilitas dan Efisiensi sebagai variabel eksogen tidak dievaluasi Q²-nya. Hasil ini menegaskan model PLS-SEM mampu menjelaskan dan memprediksi konstruk endogen dengan baik.

Goodness of Fit (GoF)

GoF digunakan untuk menilai kecocokan keseluruhan model, baik inner maupun outer model. Dalam PLS-SEM, GoF dapat dievaluasi melalui Q² atau ukuran prediktif lainnya untuk melihat seberapa baik model memprediksi variansi konstruk endogen.

Tabel 12. Nilai Goodness of Fit Model

	Average variance extracted (AVE)	R-square
Akuntabilitas	0,776	
Efektivitas anggaran	0,777	0,618
Efisiensi	0,666	
Transparansi	0,680	0,280
Rata-rata	0,725	0,449

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Perhitungan untuk nilai Goodness of Fit sebagai berikut:

$$GoF = \sqrt{0,725 * 0,449}$$

$$GoF = 0,571$$

Berdasarkan pengujian R2 dan Q2 diatas menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki GoF > 0,36 sehingga model dikatakan robust, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Pengujian Hipotesis: Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel penelitian, baik langsung maupun tidak langsung. Hipotesis diterima jika p-value < 0,05 dan t-statistik > 1,96. Analisis dilakukan menggunakan metode bootstrapping.

Tabel 13. Pengujian pengaruh langsung (*direct effect*)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Akuntabilitas -> Efektivitas anggaran	0,227	0,230	0,079	2,884	0,004
Efisiensi -> Efektivitas anggaran	0,410	0,410	0,099	4,125	0,000

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

Beberapa hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis 1 (Efisiensi → Efektivitas Anggaran)

Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran (koefisien = 0,410; t = 4,125; p = 0,000 < 0,05). Artinya, semakin efisien penggunaan sumber daya, semakin tinggi efektivitas anggaran karena output dapat dimaksimalkan dengan input yang tersedia. H₁ diterima.

b. Hipotesis 2 (Akuntabilitas → Efektivitas Anggaran)

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Anggaran (koefisien = 0,227; t = 2,884; p = 0,004 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang akuntabel meningkatkan efektivitas karena proses lebih terarah dan sesuai tujuan. H₂ diterima.

Pengujian Tidak Langsung (Efek Mediasi)

Pengujian pengaruh secara tidak langsung juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Sobel (*sobel test*). Hasil pengujian dengan menggunakan sobel test ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Akuntabilitas -> Transparansi -> Efektivitas anggaran	0,071	0,079	0,046	1,548	0,122
Efisiensi -> Transparansi -> Efektivitas anggaran	0,196	0,202	0,077	2,533	0,011

(Sumber; data diolah Smart-PLS, 2025)

- c. Hipotesis 3 (Efisiensi → Transparansi → Efektivitas Anggaran)
Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Anggaran melalui Transparansi (koefisien = 0,240; $t = 2,533$; $p = 0,011 < 0,05$). Artinya, peningkatan efisiensi mendorong transparansi yang kemudian meningkatkan efektivitas anggaran. H_3 diterima.
- d. Hipotesis 4 (Akuntabilitas → Transparansi → Efektivitas Anggaran)
Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Anggaran melalui Transparansi (koefisien = 0,099; $t = 1,548$; $p = 0,122 > 0,05$). Artinya, mekanisme transparansi belum cukup kuat untuk menyalurkan pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas. H_4 diterima (tidak signifikan).

Tabel 15. Hasil Uji Hipotesis

Kode	Pernyataan	Uji Hipotesis
H1	Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Anggaran	Berpengaruh Signifikan
H2	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Anggaran	Berpengaruh Signifikan
H3	Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Anggaran melalui Transparansi	Berpengaruh Signifikan
H4	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Anggaran melalui Transparansi	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber: Diolah penulis, 2025

Pembahasan

Pengaruh Efisiensi terhadap Efektivitas Anggaran

Hasil pengujian menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas anggaran (koefisien = 0,410; $t = 4,125$; $p = 0,000$). Artinya, semakin efisien penggunaan sumber daya anggaran, semakin tinggi efektivitas anggaran yang dicapai. Temuan ini sejalan dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), yang menekankan bahwa agen (pemerintah daerah) harus menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan principal (masyarakat). Efisiensi pengelolaan anggaran juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Alfiani, 2024; Noval, 2025). Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang efektif dan efisien berdampak positif pada pencapaian tujuan anggaran (Larasati & Handayani, 2021; Oktari et al., 2024; Ramadhan, 2024).

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Anggaran

Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas anggaran (koefisien = 0,227; $t = 2,884$; $p = 0,004$). Artinya, semakin baik pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran, semakin optimal penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan anggaran. Hal ini mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa akuntabilitas memastikan agen bekerja sesuai mandat principal (Jensen & Meckling, 1976). Temuan kuisisioner menunjukkan laporan anggaran tepat waktu, APBD terbuka, dan OPD mampu menjelaskan kebijakan anggaran, memperkuat kepercayaan publik (Ratu & Adityaputra, 2025; Vian, 2020).

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menekankan peran akuntabilitas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, baik secara langsung maupun melalui transparansi (Farahdila, 2021; Bisogno & Cuadrado-Ballesteros, 2021; Desmalita & Setyadi, 2025; Mursalin & Khaeriyah, 2025; Amelihaningsih et al., 2025).

Pengaruh Efisiensi terhadap Efektivitas Anggaran melalui Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas anggaran melalui transparansi (koefisien = 0,240; $t = 2,533$; $p = 0,011$). Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien mendorong transparansi, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas anggaran. Semakin efisien anggaran dikelola, semakin terbuka proses penggunaannya sehingga alokasi dana lebih tepat sasaran. Temuan ini sejalan dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) yang menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam hubungan antara principal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah).

Penelitian sebelumnya mendukung temuan ini: transparansi memudahkan akses publik terhadap informasi APBD (Utami & Machpudin, 2024; Simson, 2022), memperkuat pengawasan anggaran, dan meningkatkan kepuasan masyarakat (Fathirah et al., 2024; Isbandono et al., 2025; Jannah et al., 2024). Dengan demikian, efisiensi tidak hanya langsung memengaruhi efektivitas anggaran tetapi juga melalui peningkatan transparansi.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Anggaran melalui Transparansi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran melalui transparansi (koefisien = 0,099; $t = 1,778$; $p = 0,075$). Meskipun akuntabilitas penting dalam pengelolaan anggaran, pengaruhnya melalui transparansi belum cukup kuat untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme transparansi saat ini belum optimal sebagai penghubung antara akuntabilitas dan efektivitas anggaran, meskipun masyarakat memiliki akses terhadap informasi anggaran melalui sistem seperti SIPD.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan perlunya penguatan kontrol, evaluasi, dan implementasi kebijakan agar transparansi dapat meningkatkan efektivitas anggaran (Badewin et al., 2025; Harnovinsah et al., 2020; Hafiez Sofyani et al., 2020). Perbedaan utama dibandingkan penelitian lain adalah fokus pada transparansi sebagai mediator, yang dalam penelitian ini terbukti belum cukup kuat menghubungkan akuntabilitas dengan efektivitas anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu; Efisiensi pengelolaan anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas anggaran. Pengelolaan anggaran yang efisien memungkinkan pencapaian tujuan anggaran secara optimal, terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang sesuai target, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Akuntabilitas memiliki pengaruh positif tetapi relatif lebih lemah. Meski laporan anggaran tepat waktu dan APBD dipublikasikan terbuka, pengaruhnya terhadap efektivitas anggaran memerlukan dukungan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat agar hasilnya maksimal. Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas anggaran melalui transparansi. Transparansi yang meningkat, seperti akses publik terhadap informasi APBD, memperkuat akuntabilitas dan pengawasan, sehingga efisiensi dan transparansi bersama-sama meningkatkan efektivitas anggaran. Pengaruh akuntabilitas melalui transparansi tidak signifikan. Meski transparansi diperkuat melalui publikasi APBD dan sistem pengaduan, pengaruhnya terhadap efektivitas anggaran tetap terbatas tanpa pengawasan yang

konsisten. Transparansi perlu didukung mekanisme pengawasan yang efektif agar dapat meningkatkan hasil pengelolaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, N. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBD terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten ABC periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456-468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>
- Bili, J. I., & Siswati, S. (2025). Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terhadap kinerja keuangan. *Equilibrium Jurnal Bisnis Akuntansi*, Volume XIX Nomor 1.
- Chen, Z., & Hu, M. (2025). Does national auditing improve local fiscal transparency? Evidence from China. *International Studies of Economics*, 20(2), 153–161. <https://doi.org/10.1002/ise3.70007>
- Daniel, M. I., Abdillah, L. A., & Wardani, K. R. N. (2015). Evaluasi celah keamanan web server pada LPSE Kota Palembang. *Student Colloquium Sistem Informasi & Teknik Informatika (Sc-Siti)*, 19–24.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025, Juli 4). Digitalisasi laporan keuangan sebagai salah satu upaya transparansi publik. *Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut*. Diakses pada 20 Oktober 2025, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/garut/id/datapublikasi/artikel/2957digitalisasi-laporan-keuangan-sebagai-salah-satu-upaya-transparansi-publik.html>
- Farahdila, N. A. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-35.
- Fathirah, D., Nirwana, & Haliah. (2024). Budget Transparency and Accountability in Local Government. *Asian Journal of Management Analytics (AJMA)*, 3(4), 1171-1184. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878>
- Halim, A. (2018). *Manajemen keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Harnovinsah, Y., Al-Hakim, E., & Muda, I. (2020). Effect of Accountability, Transparency, and Supervision on Budget Performance. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(7), 130-143.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2015). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In *New challenges to international marketing* (pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Larasati, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana alokasi khusus bantuan operasional PAUD di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 245-250.
- López-López, V., Iglesias-Antelo, S., Vázquez-Sanmartín, A., Connolly, R., & Bannister, F. (2018). E-government, transparency & reputation: An empirical study of Spanish local government. *Information Systems Management*, 35(4), 276–293. <https://doi.org/10.1080/10580530.2018.1503792>

- Maimunah, S., & Elgina, S. (2023). Analisis implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 9(2), 41–56.
- Malik, M. A., Mustapha, M. F., & Sobri, N. M. (2021). Optimal reliability and validity of measurement model in confirmatory factor analysis: Different Likert point scale experiment. *Journal of Computing and Information Technology (JCIT)*, 9(2), 45–54. Retrieved from <https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JCIT/article/view/5511>
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Putra, A., & Yunita, N. (2021). Transparansi keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(2), 115–124.
- Putra, R., & Widodo, F. (2025). Peran akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran: Implementasi, transparansi, dan partisipasi publik. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 22(1), 56–72.
- Ratu, N. K., & Adityaputra, I. G. A. (2025). Analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Advances in Multidisciplinary and Financial Research*, 3(1), 112–125. <https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/view/637>
- Ritonga, M., & Prihatin, S. (2020). Kualitas informasi dan manfaat transparansi online dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Keuangan Publik*, 14(2), 115–128.
- Sari, P. M., & Pebriyani, D. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 7(3), 1204–1220. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.2963>
- Setiawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 51–72. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3533>
- Simanjuntak, R. (2020). Kinerja anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(3), 210–225.
- Sugiyono, (2019,2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surya, A., & Parikesit, M. (2025). *Pengelolaan anggaran publik: Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan yang efisien*. *Jurnal Keuangan Negara*, 17(4), 102–115.
- Tarima, V. R., & Md, J. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Samarinda. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(3), 682–693.
- Utami, N. A., & Machpudin, D. (2024). Budget transparency and accountability in local government: Empirical evidence from Indonesia. *Asian Journal of Management and Accounting*, 2(3), 78–92. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajma/article/view/11878>
- Wardani, W. C., & Isnowati, S. (2025). The Effect Of Accountability, Transparency And The Implementation Of Performance-Based Budgeting On The Financial Performance Of The Central Java Provincial Government With Supervision As A Moderating Variable. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 8(4), 2282–2298.